



Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Pekerja Serabutan di Kelurahan Kauman Kota Metro

Dela Khusnul Hotimah¹, Fikri Nuriat², Lutfi Ananda Widya Syari³, Putri Setia Ningsih⁴,
Sheilla Aulia Eka Putri⁵, Hotman⁶

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: khusnuldela4@gmail.com

Diterima: 18-06-2025 | Disetujui: 19-06-2025 | Diterbitkan: 22-06-2025

ABSTRACT

This research discusses economic inequality as a structural problem in Kauman Village, Metro City, with a focus on the conditions of casual workers in the informal sector. A descriptive qualitative approach was used to explore the socio-economic reality of the community through observation, interviews, and documentation. The results show that low levels of education, lack of skills, and limited access to formal employment have trapped the majority of residents in informal work without social security or income security. The local government has run various assistance programmes, but most of them are short-term and have not touched the root of the structural problems. From a political economy perspective, this inequality is also influenced by inequalities in power and resource distribution. Therefore, sustainable and inclusive solutions are needed through increased access to education, social security reform, economic empowerment programmes, and cross-sector collaboration to break the cycle of poverty.

Keywords: Political Economy, Economic Inequality, Informal Sector

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketimpangan ekonomi sebagai permasalahan struktural di Kelurahan Kauman, Kota Metro, dengan fokus pada kondisi pekerja serabutan di sektor informal. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali realitas sosial-ekonomi masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal menyebabkan mayoritas warga terjebak dalam pekerjaan informal tanpa jaminan sosial maupun kepastian pendapatan. Pemerintah setempat telah menjalankan berbagai program bantuan, namun sebagian besar masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan struktural. Dari perspektif ekonomi politik, ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses pendidikan, reformasi jaminan sosial, program pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai kemiskinan.

Katakunci: Ekonomi Politik, Ketimpangan Ekonomi, Sektor Informal

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dela Khusnul Hotimah, Fikri Nuriat, Lutfi Ananda Widya Syari, Putri Setia Ningsih, Sheilla Aulia Eka Putri, & Hotman. (2025). Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Pekerja Serabutan di Kelurahan Kauman Kota Metro. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 197-205. <https://doi.org/10.63822/wh4bnm04>

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan krusial dalam dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional mengalami tren positif selama beberapa dekade terakhir didorong oleh sektor industri, jasa, dan digitalisasi disparitas dalam distribusi pendapatan dan kekayaan antarwilayah, antarkelompok sosial, dan antarindividu justru semakin melebar. Kemajuan ekonomi yang dicapai, terutama di kota-kota besar dan kawasan industri, tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya bersifat inklusif. Ketimpangan yang terus meningkat tersebut terlihat dari berbagai indikator, seperti indeks Gini yang cenderung tinggi, perbedaan kualitas infrastruktur antara desa dan kota, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak merata. Kondisi ini menciptakan jurang sosial dan ekonomi yang dalam, serta memperkuat siklus kemiskinan di kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi tidak hanya menjadi isu teknis dalam pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan stabilitas nasional. Mengatasi tantangan ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang holistik dan pro-rakyat, yang menekankan pada pemerataan akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan layanan publik guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Fatmala, 2023).

Peningkatan perbedaan pendapatan dapat terkait dengan perkembangan ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan menjadi hal yang penting karena dapat mengurangi manfaat pertumbuhan ekonomi bagi rakyat di negara-negara berkembang. Meningkatkan ketimpangan pendapatan serta peningkatan kemiskinan menjadi masalah utama dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, besarnya pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang berbeda dapat dialami oleh berbagai negara meskipun laju pertumbuhan ekonominya serupa. Pentingnya perbedaan pendapatan dalam proses pembangunan dijelaskan oleh Alam et al., 2019, berdasarkan teorinya yang dikenal sebagai teori U terbalik, yang menyatakan bahwa distribusi pendapatan dapat memburuk akibat pertumbuhan ekonomi pada tahap-tahap awal pembangunan (Aisyah, 2023).

Ketimpangan ekonomi mengacu pada perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dan rendah dalam suatu negara atau komunitas. Ada berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, termasuk perbedaan dalam penghasilan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan dalam struktur ekonomi. Dampak dari perbedaan ekonomi juga sangat perlu diperhatikan. Ketidakstabilan dalam masyarakat, ketidakadilan di bidang ekonomi, dan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi adalah beberapa akibat yang sering dikaitkan dengan perbedaan ekonomi. Ketimpangan ini dapat menyebabkan ketegangan di masyarakat, ketidakpuasan warga, dan menghalangi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (Gunung, 2023).

Pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang, sering menghadapi masalah, dimana pertumbuhan tersebut cenderung dinikmati oleh sebagian kecil orang. Dampaknya adalah terjadinya ketimpangan yang semakin memburuk, dimana hanya segelintir individu yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Aqilah, 2024). Salah satu prioritas utama pemerintah daerah dan pusat adalah meningkatkan ekonomi. Meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan bisa berkembang jika tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di setiap daerah bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan per kapita dan mengejar pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berkelanjutan dan inklusif serta mempertimbangkan efeknya pada masyarakat dan lingkungan. Diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih adil dan sejahtera dengan kerja sama yang baik antara sektor publik dan swasta (Nurrohim, 2024). Ketimpangan mempunyai tiga aspek menurut (INFID, 2015) yaitu ketimpangan antar daerah, antar sektor, dan antar kelompok pendapatan. Selain itu, terdapat dua jenis ketimpangan, yaitu ketimpangan pendapatan dan kesempatan. Ketimpangan tidak hanya menghambat pengurangan kemiskinan, tetapi juga menunda perkembangan ekonomi serta membahayakan persatuan social (Juliana, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Pekerja Serabutan Di Kelurahan Kauman Kota Metro. Data yang diperoleh akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, pencatatan poin-poin penting, dan dokumentasi lisan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh makna dan pemahaman yang mendalam terkait pekerja serabutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Ketimpangan Ekonomi dan Tantangan Pekerja Informal di Kelurahan Kauman Kota Metro

Setiap individu memiliki standar pekerjaan yang berbeda, yang umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam teori kapital manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, stabil, dan berpenghasilan memadai. Pendidikan tidak hanya berperan dalam membentuk keterampilan teknis, tetapi juga dalam membuka akses terhadap jaringan sosial dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak seideal teori. Masih banyak masyarakat yang terjebak dalam keterbatasan ekonomi dan sosial, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi atau pelatihan kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan bersaing di pasar tenaga kerja formal yang menuntut kualifikasi tertentu. Contohnya dapat ditemukan di wilayah Kauman, Kota Metro, di mana sebagian besar warga hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang marginal. Banyak dari mereka hanya mampu menyewa rumah kontrakan kecil atau tinggal di hunian yang tidak layak, serta menggantungkan penghasilan dari pekerjaan informal yang tidak menentu. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang pada

akhirnya memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi dan menjadi hambatan serius dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, masyarakat di daerah ini tetap menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Mereka tidak menganggur, tetapi memilih menjalani berbagai pekerjaan tidak tetap, seperti pedagang kue keliling, pencari rongsokan, penarik becak, tukang parkir, hingga penjual mainan anak-anak secara keliling. Pekerjaan ini termasuk dalam kategori sektor informal, yang meskipun memberikan kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi tidak menjamin keamanan ekonomi, karena pendapatan yang diperoleh bersifat harian dan sangat tidak menentu.

Salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah rentan adalah tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Banyak dari mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) atau paling tinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Minimnya jenjang pendidikan ini secara langsung berdampak pada terbatasnya keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki, sehingga tidak mampu memenuhi standar yang dibutuhkan di sektor pekerjaan formal. Dalam konteks pasar tenaga kerja modern yang semakin kompetitif, terutama di era digital dan otomasi saat ini, kemampuan adaptif, penguasaan teknologi, serta soft skills menjadi tuntutan utama. Rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat berpenghasilan rendah terperangkap dalam pekerjaan informal, dengan pendapatan tidak tetap dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini menciptakan siklus ketimpangan yang terus berulang, karena keterbatasan ekonomi keluarga juga menyebabkan anak-anak mereka mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, generasi muda dari keluarga miskin cenderung mengulang pola ketidakberdayaan struktural yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang serius dalam bidang pendidikan dan perlindungan sosial, upaya pengentasan kemiskinan akan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pekerjaan serabutan di sektor informal tidak hanya menyisakan ketidakpastian dari segi pendapatan, tetapi juga menimbulkan dampak psikososial yang signifikan bagi pelakunya. Ketidadaan penghasilan tetap membuat mereka hidup dalam bayang-bayang tekanan ekonomi harian, yang kemudian berujung pada stres, kecemasan, bahkan gangguan kesehatan mental. Selain itu, pekerja sektor informal umumnya tidak dilindungi oleh sistem jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, maupun perlindungan tenaga kerja lainnya. Ketika mereka sakit, mengalami kecelakaan, atau tidak mampu bekerja karena kondisi fisik atau cuaca, maka secara otomatis penghasilan harian mereka terhenti, tanpa ada sistem pengaman yang dapat menopang kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjerumuskan mereka ke dalam jurang ketidakpastian hidup dan memperlemah ketahanan ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya menggantungkan harapan pada program bantuan sosial dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun pelatihan kerja yang bersifat temporer. Meskipun berbagai bentuk intervensi tersebut dapat membantu meredakan kesenjangan dalam jangka pendek, namun tanpa perbaikan struktural—terutama dalam hal akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembukaan lapangan kerja produktif—maka ketergantungan terhadap bantuan akan terus berlangsung dan memperkuat ketidakberdayaan sistemik di kalangan masyarakat miskin. Peran pemerintah menjadi sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini. Masyarakat membutuhkan intervensi yang nyata dan berkelanjutan, seperti: Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, Program padat karya yang menyerap tenaga kerja dari sektor informal, Penyediaan bantuan modal usaha bagi pekerja serabutan yang ingin memulai

usaha kecil, Serta perlindungan sosial melalui jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja sektor informal.

Kondisi para pekerja serabutan di Kauman, Kota Metro, merupakan cerminan dari persoalan struktural yang dihadapi oleh banyak masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang memadai sejak dini, minimnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta ketiadaan jaminan sosial yang memadai menyebabkan mereka terjebak dalam kondisi kerja yang tidak layak, tanpa kepastian pendapatan maupun masa depan yang lebih baik. Situasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarpemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menyusun strategi terpadu dalam memutus rantai kemiskinan dan ketidakpastian tersebut. Intervensi yang bersifat parsial tidak akan cukup. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup perbaikan sistem pendidikan, penguatan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal, perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja informal, serta penciptaan lapangan kerja produktif yang inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, barulah harapan terhadap pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat miskin perkotaan dapat diwujudkan secara nyata dan berkeadilan.

Peran Pemerintah dan Tantangan Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Berdasarkan analisis terhadap situasi pekerja sektor informal di Kelurahan Kauman, Kota Metro, tampak jelas bahwa masyarakat berpendidikan rendah menghadapi tantangan struktural yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Mereka umumnya terjebak dalam pekerjaan tidak tetap dengan penghasilan harian yang fluktuatif, tanpa perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, atau kepastian pensiun. Tekanan ekonomi ini berdampak langsung pada kondisi psikososial, seperti stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Rendahnya tingkat pendidikan semakin mempersempit peluang mereka untuk mengakses pekerjaan formal yang lebih stabil dan berpenghasilan layak. Menyadari kompleksitas permasalahan ini, Pemerintah Kota Metro telah merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi sebagai bentuk intervensi jangka panjang.

Strategi tersebut tidak hanya mencakup program bantuan sosial untuk meringankan beban pengeluaran kelompok miskin, tetapi juga diarahkan pada penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam ranah ekonomi, pendekatan dilakukan secara terpadu melalui kebijakan mikro seperti pelatihan keterampilan kerja dan pemberian bantuan modal usaha kecil dan kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan sektor informal menjadi lebih produktif dan berdaya saing. Melalui kebijakan ini, diharapkan para pekerja serabutan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri yang berkontribusi pada perekonomian lokal secara berkelanjutan (Algasi, 2019).

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi upaya perlindungan bagi pekerja sektor informal, khususnya dalam hal perluasan kepesertaan dalam program jaminan sosial. Meskipun pemerintah telah menyediakan skema perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja informal belum terjangkau oleh program-program tersebut. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sidiq Hari Madya dari BPJS Ketenagakerjaan, tingkat kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial masih tergolong sangat rendah, dengan tingkat

disparitas sektor informal hanya sebesar 1,13%. Data ini mengindikasikan bahwa jaminan sosial belum mampu menjangkau mayoritas pekerja yang berada di sektor nonformal, yang justru paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Hambatan yang dihadapi mencakup kurangnya literasi tentang pentingnya perlindungan sosial, ketidakmampuan membayar iuran secara rutin karena penghasilan tidak tetap, serta keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil atau padat penduduk miskin. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas skema jaminan sosial yang ada, disertai dengan inovasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi pekerja informal. Upaya ini dapat mencakup subsidi iuran bagi kelompok rentan, sosialisasi yang lebih intensif, serta digitalisasi layanan untuk mempermudah akses dan pendaftaran. Tanpa terobosan kebijakan yang nyata, kesenjangan perlindungan sosial akan terus menjadi titik lemah dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Madya, 2024).

Berbeda dengan sektor formal yang umumnya menawarkan pendapatan tetap, perlindungan hukum ketenagakerjaan, dan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan serta pensiun, pekerja di sektor informal tidak memiliki jaminan penghasilan maupun perlindungan sosial. Penghasilan mereka sepenuhnya bergantung pada jumlah hari kerja dan tingkat produktivitas harian, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, cuaca, dan peluang pasar. Bahkan setelah bekerja keras, hasil yang diperoleh sering kali belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Fenomena ini menjadikan sektor informal sebagai ruang kerja yang rawan dan penuh ketidakpastian. Kehadiran sektor informal di wilayah perkotaan bukan sekadar pelengkap sistem ekonomi, melainkan menjadi gejala struktural yang terus berkembang seiring dengan tingginya arus migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Sebagian besar pelaku sektor ini berasal dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah, tidak memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan permintaan pasar kerja formal, serta berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan untuk bersaing di sektor formal mendorong mereka untuk mencari nafkah melalui jalur informal, seperti menjadi pedagang kaki lima, buruh lepas, ojek pangkalan, atau pekerja harian tanpa kontrak. Meskipun sektor ini memberikan kesempatan hidup, namun tidak menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak hanya memformalkan sebagian sektor ini, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan daya saing pekerja informal agar mereka dapat naik kelas dalam struktur ekonomi nasional (Prasetya, 2020).

Analisis ekonomi politik terkait penanganan ketimpangan ekonomi di Indonesia mengungkap bahwa meskipun statistik menunjukkan adanya tren penurunan ketimpangan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir misalnya melalui penurunan koefisien Gini ketimpangan tetap menjadi isu krusial yang menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan, antara lain melalui program bantuan sosial berskala nasional (seperti PKH dan BLT), percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh sejumlah persoalan struktural dan institusional. Keterbatasan sumber daya fiskal, birokrasi yang lamban, praktik korupsi, serta lemahnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mereduksi dampak positif dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, dinamika politik termasuk kepentingan elite, tarik-menarik dalam proses legislasi anggaran, dan politisasi program bantuan sosial juga memengaruhi arah dan keberlanjutan kebijakan redistributif. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan analisis ekonomi politik secara kritis guna mengevaluasi

efektivitas program yang ada, membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong reformasi kelembagaan yang memungkinkan terciptanya sistem distribusi ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Hanya dengan fondasi politik yang bersih dan tata kelola yang baik, tujuan pembangunan yang inklusif dapat benar-benar terwujud (Putra, t.t.).

Secara keseluruhan, kondisi pekerja serabutan di Kelurahan Kauman menggambarkan persoalan struktural yang kompleks dan mencerminkan realitas yang dihadapi oleh banyak kelompok miskin di wilayah perkotaan Indonesia. Masalah ini bukan semata persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, ketimpangan peluang, dan lemahnya perlindungan sosial. Ketergantungan pada sektor informal yang tidak stabil menempatkan mereka dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, lembaga pendidikan sebagai motor peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta masyarakat sipil dan sektor swasta sebagai mitra pembangunan yang aktif. Pendekatan ini harus menyeluruh dan berkelanjutan, dengan menekankan pada prinsip keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Hanya dengan cara demikian, harapan terhadap tersedianya pekerjaan yang layak, pengurangan ketimpangan ekonomi, serta terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat bagi masyarakat miskin perkotaan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar menjadi wacana kebijakan.

KESIMPULAN

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kelurahan Kauman, Kota Metro, merupakan manifestasi dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama dan kompleks. Akar masalah utamanya terletak pada rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, keterampilan kerja yang relevan, dan perlindungan sosial yang memadai. Sebagian besar penduduk di wilayah ini menggantungkan hidup dari sektor informal, yang tidak hanya menawarkan pendapatan yang tidak menentu, tetapi juga tidak menyediakan jaminan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau perlindungan hukum tenaga kerja. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai bentuk bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan bantuan sembako, namun intervensi ini masih bersifat jangka pendek, tidak berkelanjutan, dan belum menyentuh akar persoalan struktural. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada bantuan tunai semata, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif dan sistematis. Diperlukan pendekatan jangka panjang yang menyentuh empat aspek mendasar: perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasional, pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal, reformasi sistem jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja informal, serta kebijakan distribusi ekonomi yang adil. Hanya melalui sinergi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat, ketimpangan ekonomi di Kauman dan wilayah sejenis lainnya dapat diatasi secara berkelanjutan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Kurnia Sobana Putra dan Yusuf Vedi Velandi, “Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia,” *ISSN* ., t.t., 23.

- Agung Prasetya dan Dasrun Hidayat, "Pengalaman Pekerja Informal di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Bandung," *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 2, no. 2 (10 Oktober 2020): 18–20, <https://doi.org/10.31599/komaskam.v2i2.3221>.
- Dewi Fatmala, "Problematisasi Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 1, No.4 (Desember 2023) :164
- Diko Algasi, "Evaluasi Strategi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Utara)" 2, no. 3 (2019): 2.
- Edelweis Bunga Gunung, "Menganalisis Penyebab Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi", *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, Vol.2, No.2(Juni 2023) : 330
- Hesti Aisyah, "Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Economina*, Vol 2, No.12 (Desember 2023): 3725-3726
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu DzariTM ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.
- Juliana, "Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Prespektif Politik Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 2, No.2 (Juli 2018) : 263
- M Dwi Nurrohm dkk, " Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia", *Journal of Regional Economics and Development*, Volume 1, Number 3, 2024 :2
- Muhamad Refkhi Al Aqilah dkk, " Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera", *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 4 No. 1, 2024:15
- Sidiq Hari Madya, "Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi," *Jurnal Jamsostek* 2, no. 2 (15 Mei 2024): 119, <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.27>.
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18